

PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGELOLAAN TERMINAL DI HANDIL DUA KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KECAMATAN MUARA JAWA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Renaldi Saputra¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Dinas Perhubungan dalam pengelolaan Terminal di Handil Dua Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara dan Hambatan-hambatan Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan Terminal di Handil Dua Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan Terminal di Handil Dua kelurahan Muara Jawa Pesisir, dimana Dinas Perhubungan berperan sebagai pengelola Terminal memberikan Bimbingan dan Pengetahuan Tentang Peraturan dan Ketentuan yang diterapkan dikawasan Terminal kepada masyarakat yang berada di kawasan terminal. Selain itu, hambatan-hambatan Dinas Perhubungan dalam pengelolaan Terminal di Handil Dua Kelurahan Muara Jawa Pesisir adalah kurangnya jumlah pegawai di kantor Dinas Perhubungan dan kurangnya fasilitas yang diperlukan sehingga dalam proses pelaksanaan tugasnya tidak berjalan dengan baik dan lancar yang mengakibatkan timbulnya ketidakpuasan masyarakat yang berada di kawasan terminal Handil Dua Kelurahan Muara Jawa Pesisir.

Kata Kunci: Peran, pengelolaan, terminal.

Pendahuluan

Pelaksanaan Otonomi Daerah Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, memungkinkan daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. Dengan kata lain bahwa adanya penetapan Otonomi secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Sebagai konsekuensi, daerah otonom mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: agusbucih@gmail.com

masyarakat serta sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ini berarti bahwa daerah otonom harus mampu untuk mengatur rumah tangganya sendiri secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Salah satu cerminan bahwa daerah otonomi di berikan kewenangan dan kekuasaan adalah pemberian wewenang kepada daerah yang meliputi seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta bidang-bidang lainnya yang mempunyai sifat sebagai kepentingan nasional (Hestu, 2015).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk berkreasi selain untuk meningkatkan perekonomian daerah juga menggali / meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah kepada masyarakat dan tugas pembangunan. Kenyataan yang ada, biaya yang dibutuhkan cenderung meningkat sedangkan pemerintah daerah dihadapkan pada adanya keterbatasan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial, sehingga sulit untuk melakukan perluasan objek-objek baru, atau apabila dilakukan penggalan pendapatan daerah yang kurang potensial maka prinsip pungutan daerah akan terabaikan (Hestu, 2015).

Pembangunan Ekonomi Indonesia terus dilakukan meliputi segala aspek kehidupan. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dalam upaya mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan ekonomi perlu di tingkatkan melalui perbaikan pendapatan serta peningkatan daya beli masyarakat. Pembangunan Ekonomi merupakan perbaikan taraf hidup seluruh masyarakat dimana jika Pembangunan berhasil dilaksanakan. Perbaikan tersebut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pembangunan dan bersedia berperan aktif dalam prosesnya. Jika daerah telah memiliki sumber pendapatan yang mampu memenuhi dan mencukupi kebutuhan pemerintah daerah, maka pemerintah pusat tidak lagi memiliki beban berat dalam tujuannya turut serta membangun pembangunan daerah. Peran serta pemerintah pusat dalam hal pembangunan daerah bisa berupa pemberian bantuan daerah untuk pendidikan, keluarga miskin atau untuk apresiasi sejenis tunjangan bagi tenaga pemerintah daerah (Mardiasmo, 2010).

Secara umum, keunggulan utama sektor retribusi atas sektor pajak adalah dimana tidak di tentukan secara liminatif seperti halnya sektor pajak. Pembatas utama bagi sektor retribusi adalah terletak pada ada tau tidak adanya jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengusahakan retribusi jauh lebih banyak dari pada jumlah yang telah diserahkan kepada mereka selama daerah tersebut dapat mengusahakan ketersediaan jasa untuk itu (Prakoso, 2015).

Retribusi daerah yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan jasa perizinan tertentu adalah merupakan kewenangan daerah, dimana jasa-jasa tersebut dapat memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang menikmati jasa tersebut diharuskan untuk membayar

retribusi sebagai balas jasa atas jasa yang disediakan. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi dikarenakan disediakan untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum dan selama tidak bertentangan dengan kebijakan Nasional mengenai penyelenggaraannya maka retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta dapat menjadi salah satu sumber pendapatan yang potensial. Selanjutnya dengan adanya pemungutan retribusi tersebut, memungkinkan adanya penyediaan jasa dengan tingkat dan atau kualitas yang baik (Prakoso, 2015).

Untuk itu, dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya dari sektor retribusi khususnya retribusi terminal Handil Dua, Pemerintah Kabupaten Kukar perlu menetapkan peraturan daerah Kab Kukar No. 24 tahun 1999 tentang retribusi terminal, sebagai pedoman dalam rangka Peningkatan Pemungutan dan penerimaan retribusi terminal. Hal ini dilakukan karena dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dalam sektor retribusi, pemerintah daerah dihadapkan pada sempitnya lapangan retribusi itu sendiri, disamping itu penghapusan sebagian retribusi daerah akan berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah. Untuk itu dianggap mutlak untuk mengatur dalam peraturan dan meningkatkan jumlah pendapatan yang bersumber dari sektor retribusi khususnya retribusi terminal.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Karenanya Birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang baik dan professional (Irsan, 2012). Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Tujuan pelayanan publik adalah mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah. Pelayanan hakekatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu merupakan proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan masyarakat. Menurut Irsan (2012) pelayanan umum yang didambakan setiap orang ialah:

1. Kemudahan dalam pengurusan kepentingan.
2. Mendapatkan Pelayanan Wajar.
3. Mendapatkan Perlakuan sama tanpa pilih kasih.
4. Mendapatkan perlakuan jujur dan terus terang.

Pengertian Pemungutan

Menurut Anwar (2015) pemungutan adalah suatu cara pengambilan, penarikan, pengutipan, sesuatu dimana dapat berupa bea, pajak, ataupun iuran. Adapun pemungutan yang dilakukan dapat dikarenakan sebagai balas jasa. Disamping itu pula menurut Prasatya (2015) pemungutan merupakan suatu proses peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin ataupun untuk pembangunan.

Sifat Retribusi

Dalam pelaksanaannya, Retribusi memiliki 2 sifat yaitu:

1. Retribusi yang bersifat umum, bersifat umum berarti berlaku secara umum, maksudnya pungutan retribusi memiliki sifat berlaku umum bagi siapa pun yang ingin menikmati dan memperoleh manfaat dari jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Contoh retribusi dengan sifat umum; Pedagang yang ingin melakukan kegiatan perdagangan di dalam pasar dikenakan pungutan retribusi meski misal ia hanya berjualan untuk 1 hari saja.
2. Retribusi yang bersifat khusus atau memiliki tujuan. Sifat Pungutan retribusi ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat tertentu dari jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Contohnya: Retribusi yang dibayarkan seseorang untuk memperoleh akta kelahiran.

Peran

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya (Suyanto, 2014).

Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan dinas perhubungan, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang dinas perhubungan. Dalam peran ada 3 hal yang mencakup didalamnya:

- a. Norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pengertian Pengelolaan

Pengertian pengelolaan dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesiakarya* Aditya Bagus Pratama disebutkan bahwa, pengelolaan berarti proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain (Pratama, 2012). Menurut Daft (2016) menyatakan manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Pengelolaan merupakan proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan bisa diartikan *management* yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Definisi lain pun disampaikan oleh Handoko (2014) bahwa “pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan”.

Jadi, pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka penertiban, pemeliharaan, pengaturan seara sistematika sumber-sumber yang ada dalam organisasi. Pengelolaan merupakan tindakan pengusakan pengorganisasian sumber-sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber pengelolaan senantiasa berhubungan dengan seluruh elemen yang terdapat dalam suatu organisasi, seperti pengelolaan berkaitan dengan personal, administrasi, ketatausahaan, peralatan ataupun prasarana yang ada didalam organisasi.

Berdasarkan defenisi pengelolaan diatas secara garis besar tahap-tahap dalam melakukan pengelolaan meliputi melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan, kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktifitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien unyuk mencapai tujuan.

Definisi Terminal

Terminal merupakan titik dimana penumpang dan barang masuk atau keluar dari sistem jaringan transportasi. Ditinjau dari sistem jaringan transportasi secara keseluruhan, terminal merupakan simpul utama dalam jaringan dimana sekumpulan lintasan rute secara keseluruhan bertemu. Dengan demikian terminal

merupakan komponen utama dalam system jaringan transportasi jalan yang mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting. Terminal bukan saja merupakan komponen fungsional utama dari sistem, tetapi juga sering merupakan prasarana dimana titik kemacetan mungkin terjadi (Warpani, 2012).

Sesuai dengan fungsinya sebagai tempat pemberhentian sementara (transit) maka di dalam terminal akan terjadi perpindahan penumpang atau barang dari satu jenis angkutan ke jenis moda angkutan yang lainnya, sehingga tuntutan efisiensi dari suatu perjalanan bisa tercapai. Berdasarkan tuntutan tersebut maka suatu terminal harus mampu menampung, menata dan mengendalikan serta melayani semua kegiatan yang terjadi akibat adanya perpindahan kendaraan, penumpang maupun barang sehingga semua kegiatan yang ada pada terminal dapat berjalan lancar, tertib, teratur, aman dan nyaman.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan mendiskripsikan untuk memperoleh gambaran mengenai sejauh mana Peningkatan Retribusi Terminal Handil Dua di Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau variable yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu. Kemudian menarik kesimpulan sebagai ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variable tertentu.

Hasil Penelitian

Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan Terminal di Handil Dua Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Sarana

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Fahmi sebagai supir taxi mengenai masalah sarana dan prasarana di terminal Handil Dua di Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, beliau mengatakan bahwa:

“Fasilitas yang digunakan penumpang dan sarana lain dan pelayanan di terminal sudah cukup tetapi kebersihan dari fasilitas terminal masih kurang diperhatikan. Peningkatan fasilitas terminal tidak perlu ditambah, yang harus diperhatikan fasilitas yang ada dan dibenahi dari kerusakannya”.
(14 Agustus 2017)

Sarana adalah segala sesuatu (bisa berupa syarat atau upaya) yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan, dan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dsb).

Prasarana

Untuk prasarana, dari Dinas Perhubungan Kecamatan Muara Jawa menyebutkan bahwa prasarana yang diperlukan atau dibutuhkan untuk saat ini yaitu seperti Penambahan Unit angkutan darat bagi Penumpang yang memakai jasa Terminal agar keselamatan dan kenyamanan penumpang lebih terjaga karena masih banyak unit yang sudah hampir tidak layak paka.

Dari hasil penelitian diatas yang dilakukan Penulis, maka adapun pembahasan dari hasil penelitian yaitu sarana dan prasarana adalah semua yang dapat menunjang / mendukung kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.

Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana yang dimaksud diatas berikut ini akan diuraikan istilah sarana kerja/fasilitas kerja yang ditinjau dari segi kegunaan menurut membagi sarana dan prasarana sebagai berikut :

- a. Peralatan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi langsung sebagai alat produksi untuk menghasilkan barang atau berfungsi memproses suatu barang yang berlainan fungsi dan gunanya.
- b. Perlengkapan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi sebagai alat pembantu tidak langsung dalam produksi, mempercepat proses, membangkit dan menambah kenyamanan dalam pekerjaan.
- c. Perlengkapan bantu atau fasilitas, yaitu semua jenis benda yang berfungsi membantu kelancaran gerak dalam pekerjaan, misalnya mesin ketik, mesin pendingin ruangan, mesin absensi dan mesin pembangkit tenaga.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dari sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kecamatan Muara Jawa tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat/Penumpang pada umumnya seperti Sarana Ibadah di kawasan terminal, pergantian unit angkutan darat.dari pihak Dinas Perhubungan hanya bisa membantu dalam melengkapi berkas-berkas saja yang diperlukan dalam setiap pengajuan serta permohonan bantuan dalam bentuk proposal, lebih dari itu, pihak Dinas Perhubungan tidak bisa berwenang lebih jauh karena tidak adanya anggaran yang di berikan dari pusat untuk pembuatan sarana yang dimaksud,dalam pengajuan Proposal Pihak Dinas tidak bisa memastikan disetujui atau tidak Proposal Tersebut karena dari Pihak Kabupaten yang menentukan apakah proposal dapat diterima atau tidak dan apakah layak untuk diberikan bantuan yang dimaksud.

Pembinaan dan Penyuluhan

Pembinaan

Pembinaan di terminal Handil Dua di Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara jarang terjadi, hal ini di karenakan kurangnya para sopir taxi untuk berkumpul, meskipun begitu kepala Dinas Perhubungan Kecamatan Muara Jawa berusaha memberikan waktunya untuk sedikit memberika arahan kepada para supir agar selalu menjaga keselamatan para penumpang.

Kegiatan Pembinaan Dan Penyuluhan ada hanya saja di Khususkan Hanya untuk para sopir Taxi angkutan Umum, namun hanya sedikit sekali volumenya. Karena setiap hari unit yang Standby di kawasan terminal perharinya hanya berjumlah paling banyak 3 unit saja dikarenakan kurangnya Jumlah Penumpang dan peminat jasa angkutan Umum antar Kota dalam Provinsi, jadi kegiatan sosialisasi dan Penyuluhan Tersebut biasa Kami laksanakan langsung turun ke lapangan. kegiatan ini kami laksanakan dalam kurung waktu yang tidak terlalu lama. Karena mengingat sedikitnya supir yang kami bimbing dalam kegiatan ini. Kegiatan ini kami laksanakan mengingat bahwa diantara para Supir Taxi sering melakukan pelanggaran dan kelalaian serta minimnya pengetahuan dan wawasan tentang prosedur/ketentuan sebagai sopir jasa angkutan umum (Angkutan darat) dalam Membawa unit Taxi yang dimaksud, Kelalaian tersebut berupa tidak di perpanjangnya surat-surat angkutan yang mereka kendarai hal ini merupakan tindakan yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak yang berwajib. Harapannya dengan adanya kegiatan ini agar setiap Para pengendara bisa lebih mematuhi peraturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan sehingga mengurangi dan memperkecil tindak pelanggaran di jalan raya serta bisa memberikan rasa aman dan nyaman Kepada para setiap penumpang yang memakai jasa angkutan umum di terminal Handil Dua kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penyuluhan

Kegiatan Penyuluhan serta Sosialisasi kepada pengendara (Sopir) Angkutan Umum merupakan bagian dan kegiatan dari Peran Dinas Perhubungan Kecamatan Muara Jawa Khusus Kepada para Supir dan Umum untuk Masyarakat yang berada di kawasan terminal Handil Dua agar bisa lebih berhati-hati pada saat berada di kawasan terminal ini. Karena mengingat bahwa masih banyak kejadian serta tindak Kriminalitas dan tindak kejahatan di kawasan Terminal Seperti Pertikaian, Pembunuhan, Pencurian dan Tindak kejahatan lain nya yang berbau negatif dalam kawasan Terminal Handil Dua.

Di setiap Pihak Dinas Melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan ini hanya diikuti dua atau tiga orang saja, mengingat bahwa setiap hari angkutan Darat yang standby di Kawasan Terminal Handil paling banyak tiga unit saja, besar harapan bagi para pengendara seperti saya dengan diadanya kegiatan pembinaan dan penyuluhan ini bisa membantu dan menambah wawasan khususnya bagi saya dan para teman supir lain nya yang merupakan pengendara angkutan Darat di terminal handil dua, namun masih banyak rekan-rekan kami yaitu supir angkutan darat yang lalai dalam berkendara serta melakukan pelanggaran dalam mengendarai taxi angkutan Darat.

Dalam kegiatan ini yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan terhadap para sopir taxi khususnya angkutan darat masih sangat jauh atau kurang dan sedikit sekali kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan yang dilakukan oleh pihak pengelola terminal. hal ini disebabkan karena pengelola

gterminal yaitu kepala dinas perhubungan Kecamatan Muara Jawa yang biasa memberikan Arahan dan Bimbingan kepada Para Pengendara angkutan darat di kawasan terminal Handil Dua juga terhalang oleh kegiatan yang lain yaitu kegiatan penjagaan Lalu lintas disekitar Perusahaan Batu Bara yang ada di gunung Samarinda, kegiatan pemeriksaan dan Pengecekan Angkutan Umum/Unit angkutan hanya dilaksanakan Dua bulan Sekali, ini juga menjadi salah satu penyebab pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengendara angkutan darat Terminal Handil Dua.

Iuran Retribusi Kepada Para Sopir Taksi

Kegiatan iuran retribusi ini merupakan salah satu kegiatan yang sudah di tentukan dari pihak kabupaten sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Iuran retribusi diwajibkan khusus kepada setiap angkutan darat yang terdaftar di Dinas Perhubungan Kecamatan Muara Jawa yang dilaporkan ke dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara. Setiap Kendaraan yang mempunyai izin trayek merupakan angkutan yang biasa di sebut dengan angkutan Umum (Taksi Penumpang) dimana disetiap Satu kali Perjalanan dengan tujuan Handil-Balikpapan / Handil-Samarinda dikenakan Tarif Retribusi yang sudah di tentukan oleh dinas Perhubungan Kecamatan Muara Jawa.

Wajib retribusi merupakan salah satu kewajiban yang perlu dilakukan oleh para supir taxi, tetapi dari apa yang terjadi ada sebagian supir taxi yang tidak mematuhi akan adanya wajib retribusi, hal ini dikarenakan mereka tidak membayar wajib retribusi dengan beralasan jumlah pemasukkan yang didapat belum tercukupi. Sedangkan dari pihak dinas perhubungan sudah memberi ketetapan dalam pemberian wajib retribusi tersebut. Menurut Bapak Fahmi, dinas perhubungan tidak memberikan solusi yang bagaimana mengatasi masalah tersebut.

Wajib Retribusi memang harus dibayar karena retribusi itu bukan pungutan liar kami mempunyai landasan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku, ketentuan wajib retribusi ini diwajibkan kepada para supir pengendara angkutan umum di setiap satu kali perjalanan baik tujuan ke Samarinda maupun tujuan ke Balikpapan.

Namun dalam kegiatan iuran retribusi ini masih ada saja dari beberapa pengendara angkutan yang lalai/tidak mau membayar retribusi tersebut, padahal retribusi tersebut merupakan salah satu PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertujuan untuk pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara agar lebih baik kedepan nya. Bagi Para sopir yang lalai dalam Wajib Retribusi Hanya kami berikan Teguran Lisan saja. Namun apabila sudah terlalu sering melakukan kelalaian, kami langsung memberikan sanksi atau surat keputusan kepada para pengendara angkutan yang lalai.

Wajib Retribusi Memang harus dibayarkan karena memang sudah ketentuan yang berlaku. Retribusi ini mereka bayar setiap satu kali

pemberangkatan. Mereka bayar hanya ke pengelola Terminal saja yaitu ke dinas perhubungan kecamatan Muara Jawa. Karena di terminal ini ada juga retribusi yang bersifat pungli (Pungutan Liar). Para Sopir taksi yang lalai dan tidak membayar Retribusi Tersebut Awalnya hanya mendapat teguran Lisan saja. Namun apabila Sudah sering di tegur dan masih saja melakukan kelalaian dalam pelaksanaan wajib retribusi dari pihak Pengelola Terminal Handil Dua yaitu Dinas Perhubungan Kecamatan Muara Jawa akan Memberikan Sanksi yang Terberat yaitu dicabutkan Izin Trayek angkutan umum dan tidak bisa lagi beroperasi di kawasan Terminal Handil Dua Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pengawasan Kawasan Terminal Handil Dua

Kegiatan Pengawasan di terminal handil Dua Masih dilaksanakan dengan cara pemantauan langsung di sekitar area yang bertujuan agar kawasan terminal handil dua selalu dalam kondisi aman dan terkendali. Kegiatan ini dilakukan langsung oleh pihak pengelola yaitu Dinas Perhubungan Kecamatan Muara Jawa mengingat bahwa di kawasan terminal handil Dua ini sering terjadi tindak kriminal, apabila ada kegiatan pengawasan ini tidak bisa teratasi maka pihak Pengelola meminta bantuan kepada pihak yang berwajib yaitu kepada Aparat Kepolisian maupun dari pihak Koramil untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan serta menyelesaikan permasalahan apabila ada terjadi tindak kriminalitas di kawasan Terminal handil dua Kelurahan Muara Jawa ulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pengawasan di kawasan terminal Memang Setiap hari dilaksanakan dengan cara manual yaitu langsung melakukan pemantauan di kawasan terminal Handil Dua Kecamatan Muara Jawa Walaupun tanpa adanya alat Bantu yaitu CCTV seperti yang sudah di terapkan di terminal yang ada di Kawasan perkotaan dengan tujuan agar kegiatan Pengawasan Kawasan Terminal bisa lebih Mudah Dan Efektif. Mengingat bahwa Personl yang ada pada Dinas Perhubungan Masih kurang dan hanya beberapa oprang saja. kegiatan ini kami lakukan agar setiap orang yang mau melakukan tindak kriminal dan tindak kejahatan di kawasan Terminal handil Dua bisa di batalkan. Karena apabila mereka melakukan hal tersebut kami langsung serahkan ke Pihak yang berwajib dan diproses lebih lanjut serta dikenakan undang-undang yang sesuai dengan pelanggaran nya.

Konsep Sosialisasi dan pembinaan merupakan sebuah keharusan yang harus diaplikasikan dalam kehidupan, kata konsep artinya ide, rancangan atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa kongkrit, sedangkan pengembangan artinya proses, cara, perbuatan mengembangkan. Dengan demikian konsep pengembangan adalah rancangan mengembangkan sesuatu yang sudah ada dalam rangka meningkatkan kualitas lebih maju.

Artinya, berbagai pihak yang terlibat serta berkepentingan harus saling berbagi peran dalam pengelolaan, hak dan tanggung jawab, atas suatu tanggung jawab di dalam proses pngelolaan di kawasan Terminal Handil Dua Kelurahan

Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara yang dimaksud, dengan tujuan utama agar pengelolaan lebih tepat, efisiensi, adil dan merata.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa untuk Pembinaan dan sosialisasi tidak jauh berbeda dengan upaya sebelumnya yaitu Pengelolaan. Namun dalam hal ini, kurangnya bantuan dari Kabupaten Dinas Perhubungan sangat jarang mengadakan pelatihan sehingga sangat ketinggalan jauh masyarakat yang Berada di kawasan Terminal untuk mengetahui secara materi, padahal dari Dinas Perhubungan selalu mengusulkan program tersebut ke Kabupaten tetapi yang menurut Kepala kantor Dinas Perhubungan karena kurangnya anggaran yang ada di Kabupaten tersebut menjadi penghalang atau penghambat untuk setiap kali melakukan program Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat yang ada dikawasan terminal. Sehingga Wawasan yang dimiliki masih sangat kurang dan jauh dengan yang diharapkan.

Hambatan-Hambatan Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan Terminal di Handil Dua Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara

Hambatan paling pertama adalah jumlah personil kami yang hanya berjumlah ada 5 orang saja untuk menangani dan mengelola Terminal Handil Dua yang cukup luas dan bisa dibidang masih banyak permasalahan yang sering terjadi. Contohnya seperti Tindak Kriminal, perkelahian antar Masyarakat dan kenakalan remaja. Dalam mengatasi masalah tindak criminal kami bekerjasama dengan Pihak yang berwajib yaitu dari pihak Kepolisian maupun pihak Koramil yang berada di kecamatan Muara Jawa, dan yang kedua masalah anggaran atau anggaran operasional untuk Dinas Perhubungan kecamatan Muara Jawa sampai sekarang masih kurang bahkan tidak ada sama sekali, biaya operasional kami sering mencari sendiri yaitu dari para penjual pedagang kaki lima yang berjualan did lam kawasan Terminal Handil Dua Pada Sore Hari dan ketiga kurangnya fasilitas sarana dan prasarana kami yang ada di kantor dalam menunjang kegiatan pengelolaan kawasan Terminal Handil Dua Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun hambatan yang lain seperti kurangnya fasilitas di kantor Dinas Perhubungan seperti unit Komputer yang utama, sehingga kami sangat kesulitan juga dalam membantu melengkapi berkas atau dokumen dalam setiap pengajuan proposal ke kabupaten. Yang ketiga, masalah anggaran, seperti anggaran operasional yang sampai sekarang masih kosong. Jadi banyak sekali hambatan-hambatan yang kami hadapi untuk saat ini.

Dari hasil penelitian diatas yang dilakukan Penulis, maka adapun pembahasan dari hasil penelitian yaitu berhasilnya sebuah proses pengelolaan kawasan Terminal dan pembinaan Kepada masyarakat yang berada dikawasan Terminal handil perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : (1) Masyarakat dan Para Sopir Taxi dilatih untuk mempunyai tingkat kepekaan yang

tinggi terhadap perkembangan Dan Kemajuan terminal Demi Kebaikan Bersama, (2) dibina atau dibimbing berbagai macam penambah pengetahuan dan wawasan baru sebagai jawaban atas kebutuhan dan masalah yang dihadapinya, dan (3) dibimbing untuk selalu suka bekerja sama dalam memecahkan suatu masalah.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengelolaan Oleh Dinas Perhubunga di Terminal Handil Dua Kecamatan Muara Jawa tentunya menjadi perhatian dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan terutama hambatan yang terjadi pada upaya Peran Dinas Perhubungan maupun masyarakat dan para sopir taxi yang Berada di kawasan Terminal Handil Dua Kecamatan Muara Jawa.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Peningkatan fasilitas sarana dan prasana merupakan peran Dinas Perhubungan Kecamatan Muara Jawa dimana menekankan pada pengelolaan diantaranya sarana dan prasana menjadi faktor penting yang harus di tingkatkan oleh pemerintah agar masyarakat dan Pemakai jasa khususnya sopir Taxi yang berada di kawasan Terminal Handil di Kelurahan Muara Jawa Pesisir mendapatkan kebutuhan mereka agar dapat menjalankan dan menikmati Keinginan mereka sebagai masyarakat Pemakai Jasa dan pemberi jasa yang dapat bersaing dengan Terminal yang Berada di daerah lainnya. Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki di Terminal Handil Dua kelurahan Muara Jawa Pesisir yang masih tertinggal sangat mempengaruhi perkembangan usaha mereka. Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk melihat keadaan dan kemudian memberikan bantuan pembangunan sarana dan prasarana penunjang bagi masyarakat Kawasan Terminal Handil Dua.
2. Pembinaan dan Penyuluhan Kepada Masyarakat dan para Sopir Taxi Yang Berada di kawasan Terminal handil Dua Kelurahan Muara Jawa Pesisir masih sangat minim sehingga masih jauh pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh para Masyarakat yang Berada di kawasan Terminal
3. Iuran retribusi terhadap angkutan umum (Taksi) merupakan salah satu peraturan daerah (Perda) yang sudah ditentukan dan memang sangat membantu Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penambahan Kas daerah yaitu PAD Pendapatan Asli Daerah) yang bisa digunakan Untuk Pembangunan Wilayah yang masih kurang baik serta masih memerlukan bantuan demi kemajuan Kabupaten Kutai Kartanegara. Iuran Retribusi memang harus dibayar karena retribusi itu bukan pungutan liar kami mempunyai landasan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku, ketentuan iuran retribusi ini diwajibkan kepada para supir pengendara angkutan umum di setiap satu kali perjalanan baik tujuan ke Samarinda maupun tujuan ke Balikpapan

4. Pengawasan kawasan Terminal Handil Dua masih Kurang Efektif Karena belum adanya alat bantu yang dipasang pada kawasan Terminal Handil Dua yaitu (CCTV) mengingat bahwa anggota Personil yang masih kurang sehingga kurang efisien kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Pihak pengelola Terminal.
5. Hambatan dalam pengelolaan Terminal Handil Dua Yang dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kecamatan Muara Jawa adalah bantuan sarana yang di terima untuk Kemajaun Terminal Handil Dua tiap tahunnya harus melalui tahapan lolos verifikasi proposal, karena tidak semua keinginan masyarakat yang berada di kawasan Terminal handil mendapat bantuan sarana, akibatnya sebagian besar masyarakat nelayan merasa kecewa karena tidak dikabulkan keinginannya.

Saran

1. Dinas Perhubungan Kecamatan Muara Jawa sebaiknya menambah jumlah anggota pegawai/Personil di kantor Dinas Perhubungan Kecamatan Muara Jawa agar Pelaksanaan Pengelolaan dan pembinaan dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan apa yang diharapkan.
2. Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara sebaiknya memberikan dukungan penuh terhadap Dinas Perhubungan Kecamatan Muara Jawa dalam memberikan bantuan material maupun non material agar Peran Dinas Perhubungan Kecamatan Muara Jawa dalam kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Terminal Handil Dua Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Muara Jawa yang dilakukan dapat berjalan dengan sesuai harapan.
3. Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara sebaiknya membenahi atau memperbaiki setiap sarana dan prasarana yang masih harus diperbaiki di dalam kawasan terminal Handil Dua, dan yang belum ada agar segera dicarikan solusinya.
4. Dinas Perhubungan sebaiknya melakukan pendataan ulang Kepada para pengendra angkutan dan unit yang mereka kendarai serta pendataan kepada para kelompok masyarakat yang berperan dalam Kegiatan sehari-hari dalam lokasi Terminal Handil Dua, sehingga mengurangi angka tindak keculasan (Pungli) pada penarikan Biaya tarif Retribusi Terhadap Angkutan Umum.
5. Setiap Kegiatan pembinaan serta Penyuluhan yang dilakukan oleh dinas perhubungan Kecamatan Muara Jawa bisa lebih di tekankan lagi dan di perbanyak kegiatan pembinaan nya, dengan cara ini mungkin bisa mengurangi angka tindak pelanggaran yang dilakukan oleh para Pengendara angkutan Umum (Sopir) yang ada di kawasan terminal Handil Dua
6. Dinas Perhubungan Kecamatan Muara Jawa agar segera membentuk Tim pengamanan dan pemasangan alat bantu yaitu (CCTV) di dalam kawasan Terminal Handil Dua Kelurahan Muara Jawa Pesisir kecamatan Muara Jawa kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga dalam pengelolaan dan Pengawasan

Terminal Handil dua dapat lebih terjaga Keamanan dan Keindahan Kawasannya

7. Perlu adanya sosialisasi dari lembaga institusi publik atau pemerintah untuk membantu para Pengelola Terminal Handil dalam hal permodalan seperti memfasilitator antara Masyarakat Pengguna Jasa Angkutan Umum dengan Para Sopir pengendara angkutan umu (Taxi), sehingga para penumpang dan Pemakai Jasa bisa langsung berhubungan tanpa adanya Calo liar di kawasan Terminal Handil Dua yang tidak Resmi.

Daftar Pustaka

- Anwar Prabu Mangkunegara. (2015). *Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung Remaja Rosdakarya.
- Daft, Richard L. (2016). *Manajemen, Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat
- Handoko. (2014). *Manajemen Personalia Sumber Daya Manusia, Edisi. Kedua*. Jakarta : Bumi Aksara,
- Hestu, Cipto Handoyo. (2015). *Otonomi Daerah Di Indonesia*. Jakarta : Pt Gramedia
- Irsan. (2012). *Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Simpung Di Bandar Lampung*. Tesis. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Mardiasmo. (2010). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Cv Andi Offset.
- Prakoso, K.B. (2015). *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : Uii Pres.
- Pratama. (2012). *Pengaruh Kompensasi Lingkungan Kerja Dan Beban Kerja Terhadap Loyalitas Karyawan Melalui Kepuasan Kerja (Studi Kasus Pada Karyawan Pt Kawasan Berikat Nusantara Persero Jakarta)*.
- Prasetya. (2015). *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung : Pustaka Setia,
- Suyanto. (2014). *Konsep Peran Menurut Beberapa Ahli*. [Http://Carapedia.Com/Pengertian/Definisi/Peran/Info/2184.Html.Pdf](http://Carapedia.Com/Pengertian/Definisi/Peran/Info/2184.Html.Pdf).
- Warpani, Suwardjoko. (2012). *Merencanakan Sistem Perangkutan*. Bandung : Penerbit Itb.

Dokumen-Dokumen:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 24 Tahun 1999, Tentang Retribusi Terminal.